

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK(DP2KBP3A)
DALAM MENGURANGI PEREMPUAN PENGANGGURAN USIA KERJA DI
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Fadiya Hayya Salsabila

NPP. 32.0433

*Asdaf Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: 32.0433@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra. N. Anya Risnawati SP.,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/GAP: *The high number of unemployed women in Wonosobo Regency in 2023 compared to 2022 is in line with the problem that is the focus of the local government, namely the Gender Inequality Index related to aspects of employment. Gender inequality is a problem underlying the high number of unemployed women that must be resolved immediately by the Wonosobo District Government, especially through related agencies, namely DP2KBP3A, in reducing unemployed women in Wonosobo District. **Purpose:** This research aims to discuss the role of DP2KBP3A in reducing unemployment in Wonosobo Regency. **Method:** Using the role theory by Horoepoetri, Arimbi and Santosa in Kardian (2016) on page 4 which consists of the dimensions of Role as Policy, Role as Strategy, Role as Communication Tool, Role as Dispute Resolution Tool and Role as Therapy. This research uses descriptive qualitative methods through observation, interviews and documentation obtained. The data that has been obtained is analyzed using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. **Result:** The findings on the role of DP2KBP3A in reducing unemployment in Wonosobo Regency were analyzed through 5 dimensions of Role Theory according to Horoepoetri, Arimbi and Santosa in Kardian (2016), namely: role as policy, role as strategy, role as a communication tool, role as a dispute resolution tool, and role as therapy. In the dimension of the role as a policy, it is known that the Wonosobo Regency government's work policy is already running and will continue to be developed, in the dimension of the role as a strategy it is known that DP2KBP3A Wonosobo Regency has a role as a strategy designer to reduce unemployed women of working age even though it is more inclined to housewives as job seekers, in the dimension of the role as a communication tool it is known that the delivery of information both online and offline has been running well, In the dimension of the role as a dispute resolution tool, it is known that DP2KBP3A has carried out this dimension by means of socialization and training to develop themselves in the world of entrepreneurship and plans to involve in the MBG program, in the dimension of the role as therapy, it is known that it has been well implemented, namely the female community who are not confident in their abilities can develop themselves, especially in the field of entrepreneurship in the form of home industries. **Conclusion:** The conclusion obtained is that the role of DP2KBP3A in several dimensions has been implemented quite well but needs to be evaluated. Suggestions for DP2KBP3A are that it needs to make a detailed policy on unemployed women, maximize socialization and better use of social media.*

Keywords: *Role Theory, Unemployed Women, DP2KBP3A, Wonosobo Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya angka perempuan pengangguran Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yang sejalan dengan masalah yang menjadi fokus pemerintah daerah yaitu Indeks Ketimpangan Gender yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan. Ketimpangan gender menjadi permasalahan yang mendasari tingginya angka perempuan pengangguran yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya melalui instansi terkait yaitu DP2KBP3A dalam mengurangi perempuan pengangguran di Kabupaten Wonosobo. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran DP2KBP3A dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Wonosobo. **Metode:** Menggunakan teori peran oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Kardian (2016) pada halaman 4 yang terdiri dari dimensi Peran sebagai Kebijakan, Peran sebagai Strategi, Peran sebagai Alat Komunikasi, Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa dan Peran sebagai Terapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan tentang peran DP2KBP3A dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Wonosobo dianalisis melalui 5 dimensi pada Teori Peran Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Kardian (2016) yaitu: peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi. Pada dimensi peran sebagai kebijakan diketahui bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo kerja sudah berjalan dan akan terus dikembangkan, pada dimensi peran sebagai strategi diketahui bahwa DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo memangku peran sebagai perancang strategi untuk mengurangi perempuan pengangguran usia kerja meskipun lebih condong pada ibu rumah tangga sebagai pencari kerja, pada dimensi peran sebagai alat komunikasi diketahui bahwa penyampaian informasi baik online maupun offline sudah berjalan dengan baik, pada dimensi peran sebagai alat penyelesaian sengketa diketahui bahwa DP2KBP3A sudah menjalankan dimensi ini dengan cara sosialisasi dan pelatihan untuk mengembangkan dirinya dalam dunia wirausaha serta rencana melibatkan pada program MBG, pada dimensi peran sebagai terapi diketahui bahwa telah terlaksana dengan baik yaitu masyarakat perempuan yang tidak percaya diri dengan kemampuannya ternyata dapat mengembangkan dirinya utamanya dalam bidang wirausaha berupa industri rumahan. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang diperoleh yaitu peran DP2KBP3A dalam beberapa dimensi telah dilaksanakan dengan cukup baik namun perlu dilakukan evaluasi. Saran bagi DP2KBP3A yaitu perlu membuat kebijakan rinci tentang perempuan pengangguran, memaksimalkan sosialisasi dan pemanfaatan sosial media yang lebih baik.

Kata kunci: Peran, Perempuan Pengangguran, DP2KBP3A, Kabupaten Wonosobo

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu masalah kependudukan yang terjadi pada negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif banyak yang berakibat meningkatnya angka kemiskinan suatu negara karena masyarakatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai serta berbagai permasalahan sosial. Pengangguran merujuk pada seseorang yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau bekerja hanya dalam kurun waktu kurang dari 2(dua) hari dalam seminggu(Gatiningsih & Sutrisno Eko, 2017).Pengangguran sangat berdampak bagi kesejahteraan sosial(van der Meer, 2014), kebutuhan lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan angkatan kerja yang ada yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di suatu daerah. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, mutu tenaga kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, serta pengangguran(Madjid & Umar, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 menyatakan persentase penduduk yang bekerja didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan penduduk laki-laki berbanding perempuan adalah 44,19 persen / 35,75 persen, angka penduduk menganggur ialah 5,42 persen berbanding 5,15 persen. Serapan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jumlah ketersediaan sumber daya juga menyebabkan tingkat pengangguran cukup tinggi(Yulinda et al., 2021). Persentase angkatan kerja dan pengangguran laki-laki masih tinggi, namun jumlah angkatan kerja laki-laki tidak sebanding dengan perempuan, namun angka pengangguran dari kedua gender tersebut tidak berbeda jauh, hal ini bukan tanpa alasan. Fakta bahwa "urusan perempuan sebatas urusan dapur dan rumah tangga" masih berlaku di Indonesia untuk sebagian besar perempuan. Hal ini diperkuat dengan tingginya Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Wonosobo yang sejalan dengan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan dengan angka 7,39% disbanding tahun 2022 yaitu 4,1%, sehingga hal ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Meninjau dari stereotip yang tumbuh di masyarakat dikaitkan dengan lokasi penelitian yang diambil, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonosobo per tahun 2023 menyatakan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dibandingkan perempuan adalah 103,74, berarti setiap 103,74 penduduk laki-laki di Kabupaten Wonosobo lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2020, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,28 persen tiap tahunnya. Jika dibedakan berdasarkan gender, penduduk laki-laki mengalami peningkatan sekitar 1,25 persen dan perempuan 1,32 persen tiap tahunnya (BPS Kabupaten Wonosobo tahun 2023). Berdasarkan masalah tersebut, tentunya terdapat peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memiliki fungsi untuk melakukan perlindungan atas dikriminasi gender serta pelayanan dalam menghadapi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai lowongan pekerjaan serta pendampingan mengenai kesetaraan gender kaitannya dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa kesenjangan krusial yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Salah satunya adalah tingginya angka perempuan pengangguran Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yang sejalan dengan masalah yang menjadi fokus pemerintah daerah yaitu Indeks Ketimpangan Gender yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan. Masalah pengangguran berbasis gender ini membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan masalah pengangguran secara umum yangmana membutuhkan pendekatan serta analisis yang berbeda. Sejauh ini penelitian yang ada masih terfokus pada penanganan pengangguran keseluruhan, tidak ada yang berfokus pada gender tertentu, jika ada pun kaitannya dengan stereotip masyarakat terhadap perempuan ataupun kajian mengenai peran perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Masalah yang dihadapi Kabupaten Wonosobo adalah mengenai belum maksimalisasi edukasi mengenai kesetaraan gender serta pandangan yang tumbuh di masyarakat bahwa kiprah perempuan hanya untuk mengurus rumah tangga saja, padahal potensi yang dimiliki lebih dari pada itu sehingga Dinas yang memiliki kewenangan untuk melakukan

pembinaan/pemberdayaan mengenai hal tersebut adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai lingkup perempuan dan pengangguran. Penelitian oleh Nanda Meita Sitompul pada tahun 2023 yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Jambi Provinsi Jambi” menemukan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil memiliki peran dalam mengurangi angka pengangguran dengan memberikan fasilitas dan pendampingan berupa usaha UMKM bagi masyarakat namun terdapat kendala yaitu kurangnya keahlian dan keterampilan serta sosialisasi (Sitompul & Mardhatillah, 2023). Penelitian oleh T Harri Setiawan pada tahun 2022 dengan judul “Peran Pemerintah dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat)” menemukan bahwa Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan mengadakan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja bagi tenaga pencari kerja.

Penelitian oleh I Ayu Nyoman & David Kaluge pada tahun 2009 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan pengangguran” berisi mengenai faktor faktor yang ditemukan oleh peneliti mengenai penyebab adanya perempuan pengangguran adalah kurangnya kesempatan kerja, inflasi maupun investasi, disamping memperhatikan karakteristik daerah yang dapat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan di pasar kerja (Ayu Nyoman Saskara & Kaluge, 2009). Penelitian Nabilah Niken Putri pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Kesenjangan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara” berisi mengenai adanya ketimpangan gender dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yang memengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam bekerja (Putri, 2023).

Penelitian Deva Yulinda & Suci Ramadhani Putri pada tahun 2023 yang berjudul “Stereotip Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara)” berisi mengenai pandangan masyarakat mengenai ibu rumah tangga sebagai pencari kerja dikarenakan kebutuhan ekonomi keluarganya, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencari kerja perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga dianggap sebelah mata oleh masyarakat dengan kiprahnya yang tidak harus bekerja padahal sebenarnya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan (Deva Yulinda & Suci Ramadhani Putri, 2023). Penelitian Hartati pada tahun 2015 yang berjudul “Pemberdayaan Tenaga Kerja Perempuan Melalui Pembangunan Hukum yang Berperspektif Gender” yang berisi mengenai tenaga kerja perempuan dilindungi dengan hukum yang mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan yang wajib dipedomani oleh pemilik usaha dan segala pihak didalamnya perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kesetaraan gender (Hartati, 2015), hal ini juga sejalan dengan bagaimana gender, usia dan pekerjaan mempengaruhi masuknya seseorang karena kesempatannya didorong oleh kebutuhan (Ismail et al., 2018)

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus, eksploratif, atau tinjauan literatur. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian-penelitian ini menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada penanganan DP2KBP3A dalam mengurangi perempuan pengangguran usia kerja di Kabupaten Wonosobo.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Terdapat kebaruan yang signifikan dengan fokus pada konteks yang spesifik, yaitu analisis mendalam mengenai perempuan pengangguran. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung membahas pengangguran secara umum atau kedudukan perempuan dalam masyarakat secara luas, penelitian ini menyoroti tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh perempuan yang menganggur.

Pada penelitian Nanda Meita Sitompul (2023) yang berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Jambi Provinsi Jambi lebih berfokus pada pengangguran secara umum sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pengangguran perempuan.

Penelitian kedua yang berjudul Peran Pemerintah dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat) oleh T Harri Setiawan (2022) berfokus pada peran pemerintah secara umum sedangkan penelitian saya lebih membahas pada peran Dinas yaitu DP2KBP3A dalam mengurangi pengangguran perempuan.

Penelitian yang ketiga berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan pengangguran karya (I Ayu Nyoman & David Kaluge, 2009) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga hanya menyebutkan dan menjelaskan faktor – faktor sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengaitkan faktor dengan peran DP2KBP3A.

Dengan pendekatan yang lebih terfokus, penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kalangan perempuan, serta mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok ini. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan dan aplikatif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di pasar kerja. Pemberdayaan perempuan berdampak positif bagi kesejahteraan perempuan pengangguran dengan peran aktif untuk membantu diri mereka sendiri dan menjadi penggerak nasib mereka sendiri (Thomas Omang et al., 2022).

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori peran oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Kardian (2016) dengan 5 Dimensi, yaitu Peran sebagai kebijakan, Peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan Peran sebagai terapi dengan lokus DP2KBP3A yang menjadi pembeda dari penelitian lain yang mana pada umumnya topik pengangguran akan meneliti pada Dinas Tenaga Kerja, pada penelitian ini membahas tugas pokok dan fungsi serta program DP2KBP3A terkait pemberdayaan perempuan dikaitkan dengan fenomena tingginya angka perempuan pengangguran.

1.5. Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam mengurangi perempuan pengangguran usia kerja di Kabupaten Wonosobo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi peran DP2KBP3A dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah artinya tidak dibuat-buat, hal ini disebabkan dalam pendekatan kualitatif ditekankan pada kemampuan deskripsi, analisis, sintesis dan evaluasi dari peneliti (Sugiyono, 2022:8). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Peran Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Kardian

(2016). Arikunto (2013:172) menyatakan bahwa sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Person, Place dan Paper. Person merupakan orang yang menjadi sumber data yang dapat menjelaskan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara secara lisan dan tertulis. Peneliti akan menjalankan wawancara terhadap sumber data person, kemudian akan dijelaskan lebih lanjut pada table informan dan pedoman wawancara, Place diartikan sebagai sumber data yang menampilkan Gambaran tentang situasi diam maupun situasi bergerak atau disebut juga sebagai tempat Dimana data itu didapatkan, Paper dijelaskan sebagai sumber data yang menerangkan data-data yang berupa tanda, angka, gambar, huruf atau simbol-simbol lainnya. Teknik pengumpulan data seperti observasi, memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman subjek secara lebih komprehensif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terlibat secara langsung dalam peran DP2KBP3A dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Wonosobo, selain itu pemilihan informan juga dari masyarakat. Adapun informan yang dipakai sejumlah 9 informan (Kepala DP2KBP3A, DPRD komisi D bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kabid bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Camat Kejajar, Camat Wonosobo, dan 4 Masyarakat). Adapun informan kunci dalam penelitian ini Kepala DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam serta radil pada topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini berlangsung selama 19 hari di bulan Januari 2025 berlokasi di lingkup Kabupaten Wonosobo Terkhusus di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Kardian (2016) adalah sebagai berikut:

3.1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2KBP3A) dalam Mengurangi Perempuan Pengangguran Usia Kerja di Kabupaten Wonosobo

3.1.1. Peran Sebagai Kebijakan

Berdasarkan data yang diperoleh, berbagai kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo dilandaskan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2014 tentang yang diuraikan ke dalam bentuk tabel 3.1,

Tabel 3.1
Landasan Hukum Kebijakan DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo

No	Landasan Hukum	Relevansi
----	----------------	-----------

1.	Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran untuk memberikan perlakuan yang sama bagi penduduk laki-laki dan perempuan dalam hal statusnya sebagai tenaga kerja.
2.	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah	Menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wajib mengatasi berbagai permasalahan khususnya perempuan pengangguran yang menjadi salah satu indikator indeks ketimpangan gender suatu daerah.
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	Menjelaskan bahwa masalah perempuan pengangguran tidak dapat dibiarkan yang harus ikut dijadikan prioritas program pembangunan daerah dan merupakan tugas pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan mengupayakan pembangunan di bidang perempuan.
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berisi mengenai tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A yang di dalamnya memiliki tugas untuk memberikan perlindungan mensejahterakan penduduk perempuan

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo (diolah sendiri oleh penulis), Tahun 2025

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo melalui hasil observasi masih berupa peraturan secara umum mengenai masalah pengangguran dan kesetaraan gender serta tujuan dibuatnya peraturan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat perempuan. Kebijakan khusus yang mengatur mengenai masalah perempuan pengangguran perempuan usia kerja sendiri belum dituangkan dalam bentuk peraturan baru namun hanya berupa konsep dan gambaran rencana kegiatan secara kasar dan belum secara rinci dibahas

3.1.2. Peran Sebagai Strategi

Strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo dalam mengurangi perempuan pengangguran usia kerja dalam menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi pengenalan UMKM bagi penduduk perempuan di tingkat kabupaten.

DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo berfokus pada pengembangan masyarakat perempuan dalam hal Industri Rumahan (IR) yang lebih banyak ditujukan untuk ibu rumah tangga yang mencari pendapatan dengan membuat industri olahan makanan maupun produk kerajinan lokal dengan melakukan pendampingan serta memberikan pelatihan bisnis dan strategi pemasaran berbasis digital yang bekerja sama dengan komunitas wanita dan Dinas Koperasi dan UMKM. Pendampingan dilaksanakan dengan 1 pengawas dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi beberapa kelompok Industri Rumahan binaan, mulai dari perencanaan hingga pengembangan. Pengawas Program Sosialisasi dan Pelatihan UMKM

- b. Pelatihan teknis dasar mengenai cara pemasaran produk secara *online*, sistem produksi, pemasaran, *branding*, dan pengembangan kreatifitas.

Pelatihan kewirausahaan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam perencanaan, memanfaatkan potensi dalam pengolahan makanan dan kerajinan dan mengelola usaha sehingga mampu memanfaatkan potensi lokal secara

optimal. Selain itu pelatihan juga mendorong inovasi dan kreatifitas yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan yang dilakukan disajikan secara rinci dalam tabel 3.2

Tabel 3. 2
Program Pelatihan oleh DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2024

No	Waktu	Jenis Pelatihan
1.	Maret 2023	Pelatihan pengenalan bisnis industri rumahan
2.	Juni 2023	Pelatihan <i>branding</i> produk secara digital dan cara mendapatkan sertifikasi PIRT
3.	September 2023	Pelatihan packaging produk
4.	Februari 2024	Pelatihan pemasaran/ iklan secara online dan offline
5.	Agustus 2024	Pelatihan sistem pembayaran berbasis dompet digital (Qris)
6.	Oktober 2024	Pelatihan pemasaran produk berbasis aplikasi <i>online</i> (Grabfood dan Gojek)

Sumber : DP2KBP3A tahun 2024 (diolah sendiri oleh penulis)

Berdasarkan tabel program pelatihan tersebut yang juga sejalan dengan wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa kegiatan diselenggarakan secara bergilir di kecamatan-kecamatan dengan peserta pelaku industri rumahan yaitu perempuan dari seluruh wilayah di Kabupaten Wonosobo dengan mengundang narasumber ahli yang dilaksanakan pada tahun 2023 hingga 2024 selama beberapa bulan dengan materi pelatihan dari Dinas sendiri maupun permintaan dari masyarakat yang disampaikan melalui perangkat kecamatan kepada dinas.

- c. Mendirikan tempat produksi pengolahan makanan program “Makan Bergizi Gratis” yang berlokasi di Kecamatan Wonosobo sebagai program uji coba yang menyerap karyawan perempuan dengan status mencari pekerjaan.

Pembuatan “Dapur Makan Bergizi Gratis” yang akan menghimpun perempuan yang bekerja di kantin sekolah yang pekerjaannya hilang juga karena program MBG ini sehingga siswa sekolah tidak ada yang membeli dagangannya, dengan program ini diharapkan perempuan yang kehilangan pekerjaannya tetap dapat bekerja. Program ini direncanakan akan diuji coba pada satu kecamatan sebagai *supplier* yang akan di distribusikan ke beberapa sekolah.

- d. Monitoring dalam rapat persiapan pembangunan jalan ramah perempuan dan disabilitas dengan menyertakan pekerja perempuan sebagai pekerja teknis dan konstruksi.

Konsultasi publik diselenggarakan dengan komposisi tenaga ahli perempuan/ insiyur dan masyarakat perempuan dengan komposisi 30 persen dalam rapat pembangunan jalan ramah perempuan dan disabilitas yang bekerja sama dengan PT Jasa Marga dengan melibatkan perempuan sebagai tenaga teknis dan konstruksi yang berasal dari masyarakat setempat yang belum memiliki pekerjaan yang sejak tahun 2024 sudah berjalan 2 proyek, yaitu Jalan penghubung antara Desa Candiyanan dan Keseneng di Kecamatan Selomerto dan jalan penghubung antara Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang yang diagendakan akan diprogramkan lebih lanjut di desa/kecamatan lain. Pada pelaksanaannya, perempuan tenaga teknis masih belum diikutsertakan, pihak dinas menyatakan bahwa kedepannya akan melibatkan tenaga teknis perempuan, namun pada aspek tenaga konstruksi sudah melibatkan beberapa pencari kerja perempuan yang berdomisili disekitaran proyek tersebut meskipun jumlahnya memang tidak banyak.

- e. Program “KONSER SERASI” (Konseling Sehat Remaja dan Sesi Ngobrol Asik dan Inspiratif) yang ditujukan untuk siswi SMA/SMK yang akan lulus dan akan masuk kategori angkatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan ini dilakukan secara live melalui Instagram DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo, dan PUSPAGA Wonosobo. Program ini berisi sesi konsultasi mengenai apakah siswi setelah lulus akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi atau akan langsung bekerja ataupun langsung menikah. Berdasarkan pertemuan pertama yang berlangsung pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB terdapat beberapa pertanyaan dan pihak narasumber memberikan rekomendasi tempat bekerja yang sesuai dengan minat siswa juga memberi motivasi bagi siswi yang setelah lulus akan langsung menikah. Hal ini dilakukan sebagai solusi dari permasalahan kurangnya sumbangsih tenaga kerja perempuan yang mempengaruhi ketimpangan gender yang ada di Kabupaten Wonosobo juga sebagai ajang bagi dinas untuk melakukan pendekatan secara langsung pada siswa yang sebentar lagi akan lulus.

Kelima program tersebut sejalan dengan dimensi teori yang mengemukakan peran sebagai strategi yang dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo memangku peran sebagai perancang strategi untuk mengurangi perempuan pengangguran usia kerja meskipun lebih condong pada ibu rumah tangga sebagai pencari kerja dan hanya melakukan langkah preventif dengan mengadakan konsultasi publik pada siswi SMA/SMK yang akan lulus sebelum masuk ke dalam kategori angkatan kerja.

3.1.3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Komunikasi dalam proses pemberdayaan dan pemerupakan hal yang penting (Macora et al., 2024). Penyebaran informasi mengenai pelatihan kewirausahaan bagi pelaku industri rumahan dan konsultasi publik bagi siswi SMA/SMK yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo dilakukan secara *online* melalui media sosial milik dinas yaitu instagram @DP2KBP3A_wsb dan @puspaga.wsb dan facebook @Dinas Ppkbpppa Kab. Wonosobo serta grup whatsapp dagang yang berisi kurang lebih 300 peserta dari perempuan pelaku usaha industri rumahan, bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP2KBP3A, perangkat kecamatan, desa/kelurahan dan secara *offline* melalui penyampaian dari dinas yang diteruskan pada kecamatan dan desa/kelurahan sehingga tersampaikan pada warga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 9 Januari 2025 pukul 09.55 WIB dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Ibu Iin Khusani Mariah M.P.H, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kami menggunakan akun instagram dan facebook dari dinas sendiri dan juga penyampaian secara langsung melalui perangkat kecamatan yang akan diteruskan ke desa dan kelurahan, sejauh ini kami hanya menggunakan dua *platform*, kedepannya mungkin akan lebih berkembang”

Informasi yang tersedia dalam layanan yang disediakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo adalah informasi mengenai tanggal dan rincian pelatihan kewirausahaan secara berkala bagi pelaku usaha industri rumahan yang terdiri dari ibu rumah tangga dan beberapa angkatan kerja perempuan, undangan secara *online* dan *offline* melalui surat undangan dan media sosial bagi perangkat kecamatan/desa/kelurahan berjenis kelamin perempuan dalam pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo khusus perempuan serta program konsultasi publik bagi siswi SMA/SMK yang akan lulus dan menjadi angkatan kerja. Umpan balik dari masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi bagi dinas dalam

menyempurnakan program yang ada dan menentukan kebijakan selanjutnya melalui aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui perangkat desa/kelurahan kepada kecamatan dan diteruskan kepada dinas.

3.1.4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

a. Stereotip masyarakat mengenai ketimpangan gender

Menanggapi fenomena yang ada, DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk merangkul dan menghimpun masyarakat utamanya ibu rumah tangga dan angkatan kerja perempuan yang masih dengan status menganggur untuk mengembangkan kemampuan wirausaha dalam bentuk industri rumahan sehingga siap bersaing di pasar dan mengembangkan kompetensinya serta menyertakan perempuan dalam rapat pembangunan daerah khusus perempuan serta langkah preventif untuk mencegah munculnya perempuan pengangguran melalui sesi konsultasi publik bagi siswa SMA/SMK yang akan lulus dan menjadi angkatan kerja. Guna mengatasi masalah ini dinas melakukan pendekatan sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Iin Khusaini Mariah M.P.H di ruangan beliau pada Kamis, 9 Januari 2025 pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan:

"Untuk mengatasi ini kami juga melakukan pendekatan pada masyarakat, juga menggandeng forum anak sebagai perpanjangan tangan dari kami dengan anggota siswa sekolah dan didampingi DP2KBP3A serta dan melalui kegiatan PKK kabupaten hingga desa/kelurahan dengan memberikan edukasi bahwa pendidikan itu penting dan usia berapa idealnya seseorang dapat menikah, yang diharapkan apabila masyarakat tersedukasi tentunya angka perempuan pengangguran itu juga pasti menurun dan visi kabupaten untuk mensejahterakan masyarakat utamanya perempuan dapat tercapai"

b. Program makan Bergizi Gratis yang menyebabkan pekerja kantin kehilangan pekerjaannya

Menanggapi hal ini, DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan DPRD Kabupaten Wonosobo akan membuat rencana pembuatan "Dapur Produksi MBG" dengan merekrut pekerja kantin yang kehilangan pekerjaannya sehingga dapat bekerja kembali. Berdasarkan wawancara diatas rencana program ini belum dapat dikatakan klimaks, karena terdapat beberapa persyaratan sebelum mendirikan dapur produksi MBG.

DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo menjalankan peran sebagai alat penyelesaian sengketa dengan beberapa cara yaitu pendekatan pada perempuan pengangguran usia kerja baik angkatan kerja maupun ibu rumah tangga pencari kerja dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk mengembangkan dirinya dalam dunia wirausaha dan rencana pembuatan "Dapur Produksi MBG" dengan merekrut pekerja kantin dan penduduk perempuan yang belum memiliki pekerjaan serta pendekatan secara langsung guna menghilangkan stereotip yang sudah lama tumbuh di masyarakat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam mengembangkan dirinya baik melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan tidak hanya sebatas mengurus urusan rumah tangga saja, namun pendekatan untuk menghilangkan hal yang sudah lama melekat di masyarakat dan membudaya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

3.1.5. Peran Sebagai Terapi

Mengatasi masyarakat yang tidak berdaya utamanya perempuan yang merasa dirinya tidak mampu mengembangkan dirinya dan menghidupi kehidupannya, DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo melakukan beberapa kegiatan, yaitu pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk membuka peluang bagi perempuan untuk dapat mengembangkan dirinya di bidang wirausaha yaitu berupa produksi makanan olahan (*homemade*) oleh-oleh khas Wonosobo maupun kerajinan yang mana segala proses yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga pemasaran dan evaluasi untuk pengembangan usaha dilakukan oleh masyarakat sendiri, sehingga rasa ketidakpercayaan diri bahwa perempuan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dapat teratasi.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rina Pratiwi yaitu salah satu warga binaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo pada Sabtu, 11 Januari 2025 pukul 09.30 WIB,

“Awalnya saya tahu ada program IR itu dari arisan PKK, lalu dijelaskanlah lebih lanjut dan rinci, jadi di sana saya dan beberapa ibu-ibu diundang ke pelatihan yang menghadirkan narasumber tentunya didampingi pihak DP2KBP3A, awalnya saya kerja jualan jajanan titipan orang di depan sekolah, cuma omzetnya memang kecil lalu saya coba belajar dan buat usaha sendiri, awalnya memang saya sendiri dibantu suami dan anak, tapi lama-lama ibu-ibu disekitar rumah saya saya ajak untuk bekerja untuk produksi oleh-oleh, saya belajar cara membuat logo, desain kemasan dan saya titipkan ke warung dan toko-toko hingga sampai sekarang saya punya usaha pusat oleh-oleh sendiri”

Wawancara tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan dimensi dari teori peran sebagai terapi, yang mana masyarakat perempuan yang tidak percaya diri dengan kemampuannya ternyata dapat mengembangkan dirinya utamanya dalam bidang wirausaha berupa industri rumahan.

3.2. Hambatan dan Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Mengurangi Perempuan Pengangguran Usia Kerja di Kabupaten Wonosobo

Penerapan Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Mengurangi Perempuan Pengangguran Usia Kerja tidak semuanya dapat berjalan dengan baik ataupun efektif dan efisien. Seluruh kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat.

3.2.1. Hambatan

Berdasarkan data yang diperoleh DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo dalam menangani permasalahan pengangguran perempuan juga mengalami beberapa kendala yang berasal dari internal maupun eksternal dinas. Hambatan tersebut yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Melaporkan Status Pekerjaannya

Kurangnya kesadaran penduduk perempuan dalam melaporkan status pekerjaan dapat berdampak signifikan terhadap angka pengangguran dan keberhasilan program penuntasan pengangguran perempuan oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan data yang tidak akurat mengenai tingkat pengangguran di Kabupaten Wonosobo, sehingga menghambat perumusan kebijakan yang efektif dan program intervensi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja. Alasan penduduk tidak melaporkan status pekerjaan sebenarnya adalah rasa takut akan pajak dan pengawasan yang mana hal ini dapat menciptakan

ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah.

b. Sosial Budaya

Adanya pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan dalam dunia kerja, sering kali menganggap bahwa tanggung jawab utama perempuan adalah di rumah. Banyak perempuan yang menghadapi penolakan dari keluarga untuk bekerja, yang mengurangi motivasi dan kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan.

c. Tidak ada Kebijakan Secara Rinci

Tidak adanya kebijakan pengaturan pengangguran perempuan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi Kabupaten Wonosobo. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja, di mana perempuan akan terus tertinggal dalam akses pekerjaan dan peluang ekonomi. Selain itu, meningkatnya angka pengangguran perempuan dapat menyebabkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, dan peningkatan ketegangan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

d. Perencanaan Program yang Tidak Terstruktur dengan Baik

Ketidakjelasan dalam tujuan program, kurangnya data yang akurat mengenai kebutuhan dan potensi perempuan di pasar kerja, serta minimnya koordinasi dengan instansi terkait membuat program yang dirancang tidak mampu menjangkau sasaran secara optimal. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten dalam merancang dan melaksanakan program juga memperburuk situasi. Hal ini menyebabkan program-program yang ada tidak dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap pengurangan angka pengangguran perempuan menjadi sangat terbatas.

e. Promosi Sosial Media yang Kurang Gencar

Sebagai sampel, hingga Senin, 7 April 2025 pengikut akun Instagram @dppkbpppa_wsb berjumlah 1.976, @puspaga.wsb berjumlah 735 pengikut serta akun facebook Dinas PPKBPPPA Kab.Wonosobo berjumlah 178 pengikut. Berdasarkan jumlah tersebut, bukan tanpa alasan jika penyebaran informasi tidak tersampaikan dengan baik, karena jumlah pengikut sosial media milik dinas pun tidak seberapa dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Salah satu program dinas yang terkendala yaitu “KONSER SERASI” yang mana konsultasi publik yang dilaksanakan secara *live* di akun sosial media yang digelar selama kurang lebih 3 jam hanya kurang dari 15 pengikut yang menonton dan berkonsultasi.

3.2.2. Upaya

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaporkan Status Pekerjaannya

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan status pekerjaan perempuan di Kabupaten Wonosobo sangat penting untuk keberhasilan program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam mengatasi perempuan pengangguran. Melalui kampanye informasi, pelatihan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, DP2KBP3A berusaha mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan data dan pelaporan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

b. Sosial Budaya

DP2KBP3A berupaya mengatasi stereotip yang ada dan membudaya sejak lama yang membatasi peran perempuan dalam dunia kerja melalui sosialisasi, pemberdayaan, dan pendidikan. Dengan mempromosikan kesetaraan gender, dinas berusaha mengubah stigma dan mendukung perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor pekerjaan dengan mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam dunia kerja, menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan kampanye publik untuk mengubah stereotip.

c. Tidak ada Kebijakan Secara Rinci

Tindak lanjut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi kurangnya kebijakan yang rinci tentang upaya mengurangi pengangguran perempuan usia kerja di Kabupaten Wonosobo adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Menyusun laporan yang transparan mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam mengurangi pengangguran perempuan, sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Mengadvokasi kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan isu pengangguran perempuan dalam kebijakan pembangunan daerah dan anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, DP2KBP3A dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi pengangguran perempuan usia kerja dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di pasar kerja.

d. Penyusunan Program Secara Terstruktur

Program dinas akan terlaksana dengan baik apabila disusun secara sistematis yaitu dengan menyusun rencana aksi yang mencakup langkah-langkah konkret, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab untuk setiap kegiatan serta mengalokasikan anggaran yang memadai dan realistis untuk setiap program, serta mencari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan. Monitoring program perlu dilakukan untuk melacak kemajuan program secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Tidak lupa untuk mengumpulkan umpan balik dari implementasi program untuk mengetahui dampak program dan hal apa saja yang perlu diperbaiki.

e. Promosi Sosial Media

Sosial media yang menjadi sarana penyebaran informasi harus digencarkan sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi tersebut, dengan kendala yang ada Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

a. Menambah jumlah *follower*

Yaitu dengan membuat konten yang lebih menarik serta melakukan promosi di akun lain dan membuat konten kolaborasi dengan dinas lain maupun influencer serta promosi secara langsung dari staf dinas sendiri.

b. Membuat konten yang akan di unggah secara rutin

c. Membuat konten yang lebih menarik

Yaitu dengan menggunakan berbagai format seperti video, infografis, dan cerita inspiratif untuk menarik perhatian audiens.

3.3. Diskusi Temuan Penelitian

Penelitian mengenai lingkup pengangguran dan kesetaraan gender telah banyak dilakukan sebelumnya, dengan beragam fokus dan metode. Penelitian ini hadir untuk memberikan perspektif spesifik mengenai konteks Pengangguran berbasis gender yaitu Perempuan Pengangguran yang menjadi masalah Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, bahwa Pengangguran merupakan permasalahan sosial yang sangat krusial dan berdampak kepada kerawanan sosial sebagaimana penelitian sebelumnya (Sitompul & Mardhatillah, 2023). Apabila dikaitkan dengan kesetaraan gender, bahwa kondisi daerah yang memiliki ketimpangan gender akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja sebagaimana penelitian terdahulu (Putri, 2023). Kesenjangan gender yang terjadi di DKI Jakarta antara perempuan dan laki-laki berdampak pada aspek ketenagakerjaan terkait penyerapan tenaga kerja (Rahman et al., 2021), hal ini juga sejalan dengan pernyataan penelitian sebelumnya bahwa meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan Semua orang

perempuan maupun laki-laki untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup.(Hartati, 2015)

Dalam konteks ini, fokus penelitian yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo memiliki peran yang sangat krusial. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DP2KBP3A memiliki potensi untuk mengembangkan program-program yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran di kalangan perempuan usia kerja. Temuan yang ada yaitu tidak adanya kebijakan tertulis yang secara fokus mengatur mengenai perempuan pengangguran yang mana seharusnya menjadi dasar penyusunan program oleh dinas. Dengan merumuskan kebijakan yang berbasis pada data dan analisis kebutuhan perempuan pengangguran, Perempuan pengangguran kurang memiliki pendidikan dan pelatihan padahal mereka memiliki potensi dalam bidang bisnis(Brijlal & K. Jere, 2019), DP2KBP3A dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan di pasar kerja. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Masalah perempuan pengangguran tidak bisa dibiarkan, hal ini sejalan dengan arahan Bupati Wonosobo dalam rapat akhir tahun kabupaten yang mana menyatakan tingginya Indeks Ketimpangan Gender dikaitkan dengan munculnya fenomena melonjaknya angka perempuan pengangguran Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 hingga 3,29% sehingga mendelegasikan permasalahan ini pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP2KBP3A). Timbulnya perempuan pengangguran diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu stereotip yang tumbuh di masyarakat bahwa perempuan dianggap tidak mampu dan hanya memiliki kodrat untuk mengurus urusan rumah tangga, pendidikan yang rendah dan tingkat melek huruf rendah, upah pekerja yang belum sesuai, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab yang besar atau istimewa dibanding perempuan. Keberhasilan pemerintah daerah adalah jika masyarakatnya sejahtera, namun kondisi demikian menyebabkan tujuan tersebut tidak dapat tercapai, sehingga dibutuhkan peran DP2KBP3A dalam mengurangi perempuan pengangguran usia kerja di Kabupaten Wonosobo.

Peran DP2KBP3A diuraikan menjadi 5 dimensi. Pada dimensi Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan Peran sebagai terapi sudah terlaksana dengan cukup baik utamanya pada penanganan ibu rumah tangga sebagai pencari kerja namun pada masalah penanganan perempuan pengangguran yang termasuk angkatan kerja masih belum terlaksana secara tepat sasaran karena beberapa program ditujukan bagi ibu rumah tangga pencari kerja bukan angkatan kerja perempuan meskipun pada pelaksanaannya ada angkatan kerja perempuan yang ikut serta. Sedangkan dimensi Peran sebagai Kebijakan belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya kebijakan tertulis mengenai perempuan pengangguran maupun kesetaraan gender, serta pada dimensi Peran sebagai Alat Komunikasi belum diterapkan secara maksimal karena pemanfaatan sosial media yang kurang sehingga informasi yang diharapkan tersampaikan dengan baik menjadi tidak terwujud.

Terdapat hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan status pekerjaan yang sebenarnya (menyatakan berstatus ibu rumah tangga/tidak bekerja) padahal pada kenyataannya memiliki pekerjaan, stereotip yang tumbuh dalam masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban untuk bekerja yang masih sangat melekat dan membutuhkan pendekatan yang lama untuk merubah hal tersebut serta kurangnya promosi akun media sosial milik dinas sehingga program dan informasi publik tidak dapat tersampaikan

secara maksimal. Sehingga DP2KBP3A berupaya dengan mengadakan Sosialisasi pengenalan UMKM bagi penduduk perempuan di tingkat kabupaten, Pelatihan teknis dasar mengenai cara pemasaran produk secara online, sistem produksi, pemasaran, *branding*, dan pengembangan kreatifitas. Mendirikan tempat produksi pengolahan makanan program “Makan Bergizi Gratis” yang berlokasi di Kecamatan Wonosobo sebagai program uji coba yang menyerap karyawan perempuan dengan status mencari pekerjaan. Monitoring dalam rapat persiapan pembangunan jalan ramah perempuan dan disabilitas dengan menyertakan pekerja perempuan sebagai pekerja teknis dan konstruksi, serta Program “KONSER SERASI” (Konseling Sehat Remaja dan Sesi Ngobrol Asik dan Inspiratif) yang ditujukan untuk siswi SMA/SMK yang akan lulus dan akan masuk kategori angkatan kerja.

Secara keseluruhan, peran yang diterapkan DP2KBP3A Kabupaten Wonosobo sudah cukup baik dalam mengurangi perempuan pengangguran usia kerja. Namun, peran tersebut masih perlu ditingkatkan melalui diciptakannya kebijakan secara rinci mengenai permasalahan ini serta memaksimalkan pemanfaatan sosial media. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya pembuatan kebijakan khusus terkait pengangguran agar lebih berfokus kepada bagaimana menangani perempuan pengangguran di Kabupaten Wonosobo sehingga program yang dilaksanakan memiliki landasan hukum yang jelas. Pelaksanaan program yang selama ini dilaksanakan yang lebih berfokus pada ibu rumah tangga pencari kerja untuk dapat dikembangkan tidak hanya pada ibu rumah tangga, namun juga angkatan kerja perempuan yang masih menganggur, juga perlunya memaksimalkan pelaksanaan program serta menggalakkan promosi program sehingga informasi yang diharapkan dapat tersampaikan lebih luas serta perencanaan lebih lanjut mengenai program pembuatan “Dapur Produksi MBG” sehingga tidak hanya sebatas rencana namun dapat segera terealisasi. Dengan demikian, peran DP2KBP3A dalam mengurangi perempuan pengangguran usia kerja diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa kecamatan saja sebagai sampel, sehingga mungkin masih ada yang belum ditemukan oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi maupun lokasi yang lain untuk dapat melihat cara-cara kreatif dalam meningkatkan minat warga utamanya perempuan pengangguran usia kerja yakni ibu rumah tangga pencari kerja dan angkatan kerja perempuan sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat bersaing di dunia kerja tanpa mengawatirkan adanya diskriminasi gender. Peneliti mengharapkan adanya ide-ide yang lebih tepat terkait penggunaan sosial media dan penyampaian informasi secara *offline* sehingga informasi dari dinas dapat tersampaikan secara menyeluruh serta adanya jawaban dari masalah kurangnya regulasi secara tertulis serta Langkah yang dilakukan setelah adanya kebijakan yang tepat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Wonosobo Ibu Dyah Retno Sulistyowati S.STP., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Pdf-Buku-Suharsimi-Arikunto-Pdf-Free_Compress.Pdf* (p. 212).
- Ayu Nyoman Saskara, I., & Kaluge, D. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Perempuan. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.003.02.2>

- Brijlal, P., & K. Jere, A. (2019). Identifying and Exploiting Economic Opportunities : The Case of Unemployed Women in Khayelitsha Township, Cape Town. *African Journal of Business and Economic Research*, 14(2), 5–23. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2019/14n2a1>
- Deva Yulinda, & Suci Ramadhani Putri. (2023). Stereotip Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 83–98. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.7920>
- Gatiningsih & Sutrisno Eko. (2017). No Title. *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja*, 68.
- Hartati, S. (2015). *PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PEREMPUAN MELALUI PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF GENDER (Studi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Borobudur.
- Ismail, A., Tolba, A., Ghalwash, S., Alkhatib, A., Karadeniz, E. E., Ouazzani, K. El, Boutaleb, F., Belkacem, L., & Schøtt, T. (2018). Inclusion in entrepreneurship, especially of women, youth and unemployed: status and an agenda for research in Middle East and North Africa. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 14(4), 528. <https://doi.org/10.1504/WREMSD.2018.093608>
- Macora, N. A. D., Polyando, P., & Hutasoit, I. (2024). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Kerajinan Noken Mama Papua Di Distrik Wania , Kabupaten Mimika. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 29–39.
- Madjid, U., & Umar, A. U. (2023). Efektivitas Program Pelatihan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja Dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Academia Praja*, 6(2), 340–352. <https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1738>
- Putri, N. N. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*, 1–23.
- Rahman, J. H., Mumtaza, F. H., Putra, R. T. N., Kintoro, F. S., Rahayuli, R., Nur'aini, A. O., Ramadhani, N., Rostika, M. D., Tristan, A. C., & Putri, R. F. (2021). COVID-19 and Gender Role in Unemployment: How Women in Special Capital Region of Jakarta is Less Likely to be Unemployed During Economic Disturbance. *E3S Web of Conferences*, 325, 06014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132506014>
- Sitompul, N. M., & Mardhatillah, Y. (2023). Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Kota Jambi Provinsi Jambi. *Jurnal Registratie*, 5(2), 142–161. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3710>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Cetakan Ke). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpesikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Susanto. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 16, Issue 1). Pradina Pustaka.
- Thomas Omang, A., Thompson Okpa, J., & Nnana Okoi, O. (2022). Women's Empowerment and the Well-Being of the Unemployed Women in Yakurr, Nigeria. *Journal of International Women's Studies*, 24(1).
- van der Meer, P. H. (2014). Gender, Unemployment and Subjective Well-Being: Why Being

Unemployed Is Worse for Men than for Women. *Social Indicators Research*, 115(1), 23–44. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0207-5>

Yulinda, F., Hirawan, Z., & Ma'ruf, K. (2021). Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan Di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).

<https://doi.org/10.31506/jap.v12i1.11153>

